

**IMBALAN JASA KURATOR DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT.
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT.TELEKOMUNIKASI
SELLULER)
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
NO:48/PAILIT/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST.**

Dwi Atmoko

Abstrak

Pada saat Debitor dinyatakan Pailit, pada saat itu pula kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pengurusan terhadap harta Debitor Pailit tersebut akan dilakukan oleh Kurator. Kepailitan ini mempunyai sifat serta merta, sehingga walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit, upaya hukum tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan kepailitan tersebut. Penulisan tesis ini akan membahas mengenai bagaimana hukum pembuktian yang dipergunakan dalam proses kepailitan?, bagaimana pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor pailit oleh kurator?, serta bagaimana pembebanan imbalan jasa kurator dan perlindungan terhadap harta Debitor pailit yang putusan kepailitannya dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung?. Dalam pelaksanaannya pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum memberikan perlindungan hukum terhadap harta Debitor Pailit. Selanjutnya harta Debitor Pailit dilakukan pengurusan dan pemberesannya oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam proses penyelesaian kepailitan ini muncul biaya kepailitan termasuk imbalan jasa kurator dalam jumlah besar yang harus dibayarkan dari boedel pailit dan pemohon kepailitan, sedangkan putusan pernyataan pailit itu sendiri ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus kepailitan PT Telekomunikasi Selluler. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatar belakangi permasalahan, kemudian dengan cara menganalisa fakta dan data yang diperoleh, untuk memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisa yang dilakukan.

Kata Kunci : Imbalan Jasa Kurator, Kepailitan, Debitor, Harta Pailit

**FEE OF CURATOR SERVICES AND PROTECTION OF
DEBTOR BANKRUPT ASSETS
(BANKCRUPTCY CASE STUDY OF PT TELEKOMUNIKASI
SELLULER)**

**The decision of the Central Jakarta commercial Court no:48 /
PAILIT /2012 / PN. NIAGA.JKT.PST.**

Dwi Atmoko

Abstract

When a Debtor is declared bankrupt, at that time, he also loses the right to control and manage his wealth. The handling of the Bankrupt Debtors' property will be done by the Curator. This bankruptcy has the nature” *uit voorbaar bij voorraad*, so even if there is a legal effort made by the Bankrupt Debtor, such legal efforts will not stop the implementation of bankruptcy. The writing of this thesis will discuss about how the law of evidence used in the bankruptcy process, how the management and/or settlement of the Debtor's property is insolvent by the Curator, how the charging of the Curator service fee and the protection of the bankrupt Debtor's property whose bankruptcy decision is canceled on appeal by the Supreme Court. The method used in writing this thesis is normative legal research, using secondary data, while data analysis method using qualitative approach method. This study provides an analytical descriptive result that provides a broad overview of the underlying facts of the problem, then by analyzing the facts and data obtained, to provide an alternative problem solving through analysis conducted.

Keywords: Fee of Curator Services, Bankruptcy, Debtor, Bankruptcy Assets.